

Rancangan akhir Rencana Strategis 2025-2029



***Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Seluma- Propinsi Bengkulu***



**JLN PERUMAHAN DINAS BUPATI-AMPAR GADING
KELURAHAN LUBUK LINTANG-KEC SELUMA KOTA,
SELUMA
PROPINSI BENGKULU (38576)**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 Bab II Gambaran Pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD	 6
2.1. Gambaran Pelayanan perangkat Daerah.....	6
2.1.a Gambaran Pelayanan perangkat Daerah.....	6
2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.2. Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.a Permasalahan Pelayanan PD	32
2.2.b Isu strategis.....	35
 Bab III. Tujuan,Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan.....	 45
3.1. Tujuan Renstra PD 2025 – 2029	45
3.2. Sasaran Renstra PD 2025 – 2029	45
3.3. Strategi Renstra PD 2025 – 2029	46
3.4. Arah Kebijakan PD 2025 – 2029	48
 Bab IV Tujuan dan Sasaran	 51
4.1. Program Perangkat Daerah.....	51
4.2. Uraian Kegiatan.....	55
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	71
4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.	97
4.5. Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.	99
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	101
 Bab V Penutup 	 103
 Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025 - 2029

Rancangan Akhir Rencana Strategis Ini merupakan penjabaran dari Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKP Daerah

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu tugas-tugas kami sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan mudah-mudahan dapat “TERWUJUDNYA KABUPATEN SELUMA EMAS BERLIAN (ELOK, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN BERIMAN)”

Tais, 2025
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Seluma,

SUSI ARITONANG,SE
NIP.197603162006042002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Wilayah Kabupaten Seluma memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alamnya, faktor non alam maupun faktor manusia.

Dalam penanganan bencana telah diberikan kewenangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Seluma

Dalam menyatukan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, wajib memiliki acuan, yakni Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029. Sebagaimana dimaklumi bahwa Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu dokumen Perencanaan yang akan menjadi landasan kerja sekaligus memberi arah bagi setiap program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun.

Maka Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang dilandasi dengan RPJP Kabupaten Seluma serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - PD) merupakan dokumen yang akan menjamin tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan bidang / tupoksi masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk periode 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Renstra merupakan landasan SKPD dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategi (Renstra) tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi, Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2025-2029 sehingga kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) lebih terarah, terprogram dan teratur.

Berdasarkan dari program tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma mengedepankan pertimbangan potensi dan peluang yang dimiliki serta hambatan dan ancaman yang mungkin akan dihadapi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam penanggulangan

- Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6322)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Provinsi / Kota);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1. 15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 12)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 09)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 7)
 20. Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2025 – 2029 disusun untuk :

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Trantibumlinmas untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Menyelaraskan Visi dan Misi Bupati serta Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Perumusan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma bertujuan :

- Terarahnya semua rencana program dan kegiatan dalam penanganan bencana.
- Terlaksananya tugas pembangunan di bidang penanggulangan bencana.
- Termanfaatnya potensi dan peluang dalam penanganan bencana.
- Menjadi landasan dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Seluma tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjabarkan Latar belakang penulisan Renstra BPBD tahun 2025-2029 yang merupakan sebuah upaya untuk melihat yang dikelola oleh BPBD berkaitan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana. Selain itu juga dijabarkan dasar hukum penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan renstra BPBD tahun 2025-2029

Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjabarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan Peraturan Bupati No 43 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma termasuk sumber daya yang tersedia serta evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan tantangan yang diemban BPBD Kabupaten Seluma dan Menguraikan penyebab belum terwujudnya Visi dan Misi Daerah dan Tujuan daerah pada Bidang Trantibumlinmas sub urusan bencana.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Merumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan bersumberkan dari RPJMD Kabupaten Seluma dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan Merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Periode 2025 – 2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Merumuskan rencana program dan kegiatan serta menguraikan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan perangkat Daerah

2.1.a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

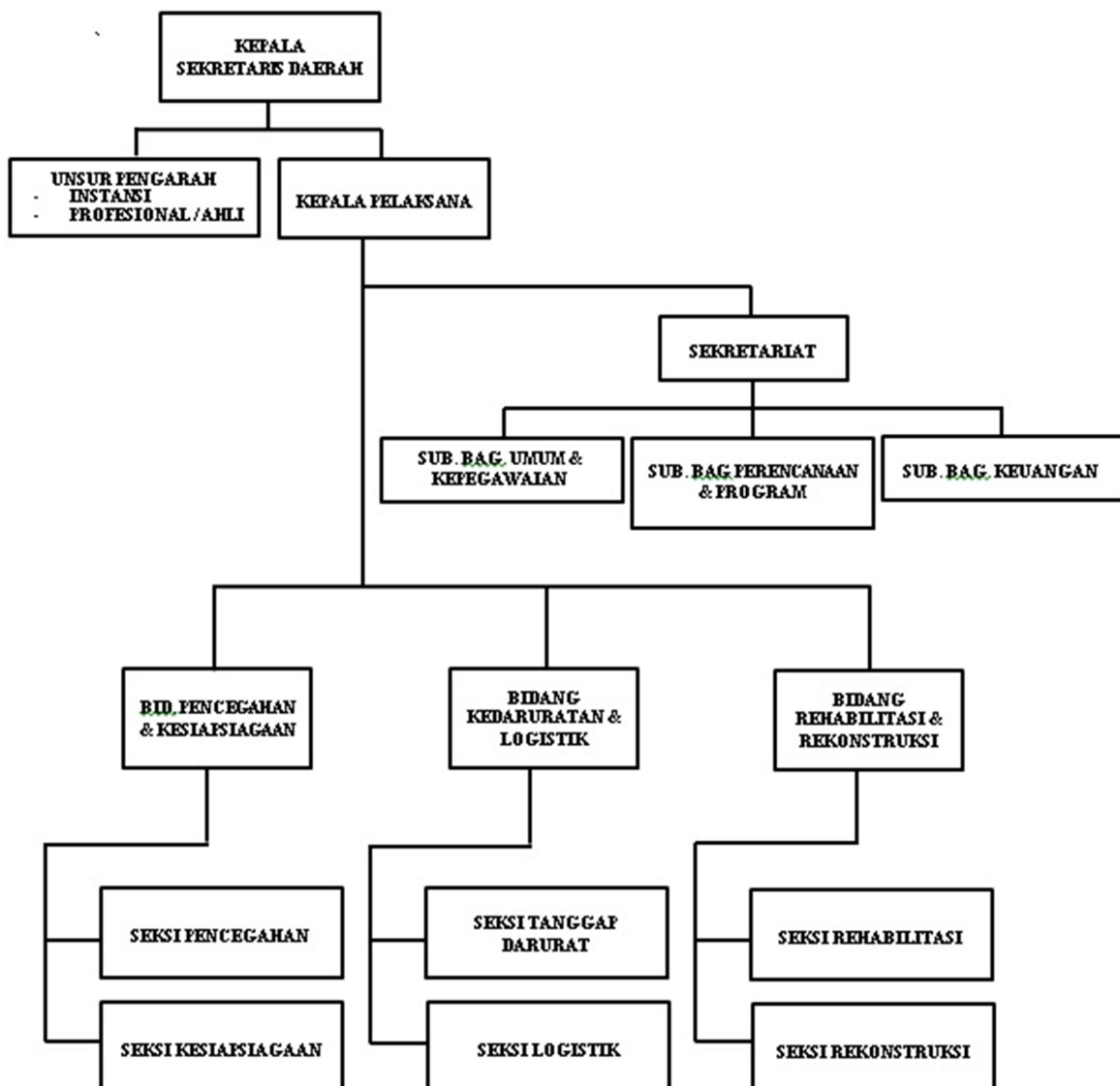
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma memiliki tugas pokok untuk melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Struktur Organisasi BPBD Seluma

**A. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma****Tugas Pokok :**

- Mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrative dan operasional Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang prabencana, tanggap darurat pasca bencana serta hubungan antar lembaga.
- Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Seluma melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan tugas dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penyelenggara koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah bencana.
- d. Penyelenggara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- e. Penyelenggara pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Rincian Tugas :

- a. Menyelenggarakan pembina pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada penanggulangan bencana daerah.
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. Menyelenggarakan komando pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistic baik dari satuan kerja langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.
- f. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil, setara dan merata.
- g. Menyelenggarakan penyusunan, dan penetapan pedoman standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana.
- i. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tatap penanganan bencana.
- j. Menyelenggarakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara transparan.
- k. Menyelenggarakan pengambilan tindakan sebagai upaya memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang berupa isolasi / penutupan suatu lokasi baik milik publik maupun milik pribadi yang memiliki potensi bahaya bencana, menyingkirkan / memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan, memerintahkan orang untuk

keluar / masuk pada suatu lokasi, serta memerintahkan pimpinan instansi / lembaga terkait upaya penyelamatan.

- l. Menyelenggarakan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana kepada Bupati Seluma.
- m. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Bupati Seluma setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- n. Menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping maupun dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- o. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan kesiagaan, penanggulangan bencana, dan pemulihan kondisi pasca bencana serta penanggulangan pengungsi.
- p. Bertanggungjawab atas penelitian dan keberadaan hasil kerja staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- q. Menyampaikan saran, pendapat dan telaah kepada Bupati Seluma melalui Kepala Badan Penanggulangan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Seluma melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, inventarisasi dan kearsipan Badan;
3. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kepala Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas;
5. Mengkoordinasikan kepala bidang dan kepala sub bagian dalam melaksanakan tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;

6. Melakukan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan guna menunjang program kerja Badan dan peningkatan pelayanan publik;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja badan;
8. Menilai prestasi kerja Kepala sub bagian dilingkungan sekretariat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan Badan;
 3. Melakukan urusan kerumahtanggaan Badan;
 4. Melakukan urusan pengelolaan Badan;
 5. Melakukan urusan kepegawaian Badan;
 6. Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban tugas dan analisa jabatan pada Badan;
 7. Menyusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 8. Menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai Badan;
 9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 1. Menghimpun perencanaan dari bidang untuk disusun sebagai rencana dan program kerja BPBD Kabupaten Seluma;
 2. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
 3. Mengkoordinir evaluasi dan penyusunan laporan rencana dan program kerja Sekretariat dan Bidang dilingkungan BPBD Kabupaten Seluma;
 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 5. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Seluma;
 6. Mengkoordinir laporan Sekretariat dan Bidang sebagai laporan BPBD Kabupaten Seluma;
 7. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kewajiban dari bidang untuk selanjutnya dibuat laporan Badan Penanggulangan Bencana daerah secara keseluruhan dan disampaikan kepada Bupati;
 8. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja anggaran Dinas yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang-bidang yang ada;
2. Melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan Dinas;
3. Menyampaikan laporan, realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
4. Member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan umum dibidang pencegahan bencana dan pemberdayaan masyarakat untuk antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi dan kondisi pra bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai Fungsi :

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
3. Mengkoordinasikan kebijakan pencegahan, antisipasi dan kesiapsiagaan bencana kepada dinas/instansi yang terkait;
4. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, antisipasi dan kesiapsiagaan bencana;
5. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan pengembangan karier;
6. Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan atasan;

a. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan identifikasi, menginventarisir dan membuat peta daerah rawan bencana;
2. Mengelola data dan informasi daerah rawan bencana secara berkala;
3. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat sekitar yang di estimasi bakal terjadi atau terkena bencana berdasarkan analisis kemungkinan terjadinya bencana dengan tujuan mengurangi resiko dan bahaya yang akan dihadapi;
4. Melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan tata ruang dengan melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait;

5. Melakukan sosialisasi atas kondisi objektif daerah rawan bencana dengan menjelaskan resiko, bahaya dan keadaan yang bakal terjadi ketika datang bencana;
 6. Memastikan informasi akurat dan diumumkan secepatnya
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
1. Membentuk dan membina Kelompok Masyarakat Tanggap dan Siaga Bencana di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seluma;
 2. Melaksanakan simulasi dalam menghadapi situasi dan keadaan bencana;
 3. Melakukan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 4. Menyelenggarakan dan atau mengikuti pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 5. Membuat peta atau bagan master/utama daerah/tempat terjadinya bencana;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menginventarisir data kerusakan dan kerugian serta melakukan penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas;

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
3. Mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
4. Menginventarisasi data kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana;
5. Mengevakuasi korban bencana;
6. Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana;
7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
8. Menilai prestasi klerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
9. Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- a. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
 1. Melakukan identifikasi secara cepat dan tepat mengenai cakupan lokasi bencana;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara baik dengan pihak atau instansi terkait guna membuka keterisoliran sarana transportasi menuju lokasi bencana untuk evakuasi dan distribusi bantuan;
 3. Mendata secara langsung ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh para korban bencana;
 4. Melakukan mobilisasi tim atau personil ke tempat lokasi bencana;
 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak/Dinas/Instansi terkait untuk mempersiapkan tim medis bagi keadaan darurat;
 6. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, harta benda dan yang diidentifikasi bakal terkena dampak dari bencana tersebut;
 7. Membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat;
 8. Menghitung dan mencatat jumlah korban meninggal dan luka berat, prasarana dan sarana, gangguan pelayanan dan pemerintahan akibat bencana;
 9. Memberi bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
 10. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara baik dengan pihak atau instansi yang akan membantu atau sedang/sudah melakukan bantuan kepada korban bencana di lokasi bencana;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Seksi Logistik mempunyai tugas :
 1. Mengadakan koordinasi untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
 2. Mengendalikan pengumpulan bantuan dari pihak donatur/penyumbang dan penyaluran bantuan uang dan barang kepada korban bencana;
 3. Menyiapkan dan menyalurkan bantuan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
 4. Menyiapkan dan memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 5. Menyiapkan sarana pusat informasi dan komunikasi/*call center* pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 6. Membuat catatan jumlah dan sasaran bantuan yang akan didistribusikan;
 7. Mendata jenis, jumlah dan penerima bantuan yang sudah disalurkan;
 8. Menyiapkan bahan, barang, dan peralatan untuk pelaksanaan pemulihan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana;

9. Melakukan inventarisir peralatan dan perlengkapan BPBD Kabupaten Seluma;
10. Melakukan pengamanan dan perawatan peralatan dan perlengkapan BPBD Kabupaten Seluma;
11. Setiap dua hari memastikan menghitung persediaan (*stock opname*)
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
 3. Mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam;
 4. Membagi tugas kepada bawahan/staf sesuai dengan bidangnya;
 5. Member petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Menilai prestasi kerja bawahan/staf untuk pembinaan pengembangan karier;
 7. Menyusun lapoaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 8. Melaksanakan tugas laian yang diberikan atasan.
- a. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
1. Menginventarisir dan melakukan analisis kerusakan dan kerugian bidang sosial ekonomi dan budaya masyarakat akibat bencana;
 2. Menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
 3. Menyiapkan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada korban bencana;
 4. Melakukan perbaikan lingkungan bencana;
 5. Melakukan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 6. Melakukan pemulihan kondisi psikologis korban bencana;
 7. Melakukan pemulihan fungsi pemerintahan;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

1. Menginventarisir dan melakukan analisis kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana;
2. Melakukan peningkatan fungsi pelayanan publik;
3. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
4. Melakukan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
5. Melakukan perbaikan dan atau pembangunan kembali kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana;
6. Melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan sebagai masukan (input) sehingga menghasilkan suatu kinerja (Out Put) dari proses yang terjadi. Sumber daya dalam sebuah organisasi meliputi banyak hal mulai dari yang mencakup sumber daya manusia, asset / modal dan unit usaha yang masih operasional maupun sumber daya keuangan.

➤ Tabel 2.1..1 Komposisi Pegawai

NO	Klasifikasi Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	17	Orang
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	26	Orang
3	Tenaga Kontrak	39	Orang
Jumlah		82	

➤ Tabel 2.1.2 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	3	Orang
2	Strata 1	28	Orang
3	Diploma 3	2	Orang
4	SMA/ Sederajat	10	Orang
Jumlah		43	Orang

➤ Tabel 2.1.3 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Golongan

NO	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	2	Orang
2	Golongan III	29	Orang
3	Golongan II	12	Orang

Jumlah	43	Orang
--------	----	-------

➤ Tabel 2.1.4 Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Seluma
Daftar Kendaraan

NO	URAIAN/NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	NO POLISI
1	Mobil Toyota Avanza	1	Unit	BD 42 P
2	Isuzu/NKR 71 HD E-2-2	1	Unit	BD 9962 RZ
3	Minibus Isuzu /TBR 54 Turbo LV	1	Unit	BD 1946 RZ
5	Pick-Up Isuzu /TBR 54 Turbo	2	Unit	BD 9961 RZ BD 9960 RZ
6	Motor Kawasaki KLX 150	2	Unit	BD 2716 PY BD 2717 PY
7	Motor Kawasaki KLX 150 G	1	Unit	BD 2979 PY
8	Motor Kawasaki KLX 150 S	2	Unit	BD 6801 PZ BD 6802 PZ
11	Motor Honda Blade	2	Unit	BD 2715 PY BD 2714 PY

Daftar Peralatan

NO	URAIAN/NAMA ALAT	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI/MEREK
1	Generating Set (Genset)	1	Unit	Honda 3000 w
2	Global Positioning System	1	Unit	
3	Papan Tulis	4	Unit	
3	Meja Kayu	2	Unit	Olimpic
4	Meja Besi/Metal	2	Unit	Olimpic
5	Meja ½ Biro	5	Unit	Olimpic
6	Kursi Tamu	1	Set	Olimpic
7	Handy Talky (HT)	1	Buah	kenwot
8	Laptop	3	Unit	Acer
9	Meja Kerja Kayu	1	Unit	Lokal ½ Biro
10	Buffet Kaca	1	Unit	Lokal
11	Papan Pengumuman	9	Unit	
12	Meja Rapat	1	Unit	
13	Kasur/ Spring Bed	1	Unit	
14	Kursi Tamu	1	Unit	
15	Bangku Tunggu	1	Unit	
16	AC Window	1	Unit	SHARP 1 PK
17	Tandon Air	1	Unit	Tedmon 1200 L
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	1	Buah	
19	Lemari Buku Arsip	2	Buah	
20	Handy Talky (HT)	10	Unit	Lupax T550
21	Laptop	5	Unit	Toshiba L840
22	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	Unit	Rubber Boat AX-360
23	Alat Produksi Perikanan Lainnya (Mesin Perahu)	1	Unit	Suzuki 40 PK
24	Lemari Kaca	1	Unit	
25	LCD Projecktor/ Infocus	1	Unit	
26	Kursi Tamu	1	Unit	

27	Meja Cetak	1	Unit	
28	Sound System	2	Unit	
29	Mic Wireless	1	Unit	
30	Perahu Penumpang	1	Unit	Perahu Polyethylene
31	Alat Produksi Perikanan Lainnya (Mesin Perahu)	1	Unit	Silinger/ Perahu Karet
32	Alat Produksi Perikanan Lainnya (Mesin Perahu)	1	Unit	Portatobote
33	Alat Produksi Perikanan Lainnya (Mesin Perahu)	2	Unit	Tohatsu 9,8 PK
34	Alat Produksi Perikanan Lainnya (Mesin Perahu)	1	Unit	Parsun 25 PK
35	Kamera Digital	1	Unit	Nicon
36	Rak Peralatan	1	Unit	Lokal
37	PC	1	Unit	Adata
38	Laptop	1	Unit	Asus
39	Tenda Pengungsi	2	Unit	
40	Tenda Posko	1	Unit	
41	Tenda Pengungsi	1	Unit	
42	Teda Keluarga	1	Unit	
43	Brandkas	1	Unit	Secure Line
44	Alat Selam	1	Unit	
45	Alat Kusus SAR	1	Unit	
46	Gergaji Chainsaw	2	Unit	Chainsaw
47	Trailer / Tangki Air	1	Unit	
48	Lemari Es	1	Unit	Polytron
49	TV	1	Unit	Sharp
50	Laptop	1	Unit	Acer a.15
51	Printer	1	Unit	Cannon Pixma e 410
52	Printer	1	Unit	Cannon Pixma Ip 2770
53	Gerobak Dorong	5	Unit	Arteco
54	Cangkul	1	Unit	
55	Mesin Rumput	1	Unit	
56	Karpet	1	Buah	
57	Panggung	1	Set	

2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma terbentuk dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 dan dalam melaksanakan kegiatan masih belum maksimal karena keterbatasan sarana serta prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan namun hal itu tidak membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma lemah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Seluma.

Adapun kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat dalam **Tabel 2.1.5 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah** dan **Tabel 2.1.6 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan BPBD ke depan lebih mengutamakan kepada Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Dearah Kabupaten dan Program Pengurangan Risiko Bencana dengan target pengembangan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Secara legalitas, kinerja pelayanan BPBD tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Dearah Kabupaten Rencana Penanggulangan Bencana pada tahun 2024 pencapaian SPM Kebencanaan terealisasi 88%. Dengan mempertimbangkan Kajian Risiko Bencana yang telah disusun. Salah satu kajian yang dibahas dalam KRB adalah tingkat Kapasitas daerah dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang terdiri dari 71 Indikator, berdasarkan hasil verifikasi BNPB nilai Indikator Ketahanan Daerah pada tahun 2024 dengan nilai 0,40 (Sedang) . Keseluruhan program dan kegiatan diharmonisasikan ke dalam Rencana Strategis BPBD.

Tabel2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah-BPBD Kabupaten Setuma																					
No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Interpretasi	
					1=2020	2=2021	3=2022	4=2023	5=2024	1=2020	2=2021	3=2022	4=2023	5=2024	1=2020	2=2021	3=2022	4=2023	5=2024	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	NILAI EVALUASI SAKIP				B	BB	BB	A	A	BB	BB	BB									
1	Kelancaran administrasi dan keuangan	0%	1		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	100%	100%	100%	50,0%	0%		
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kinerja	Kemenpan RB	34 Dokumen		6	34	34	34	34	6	34	34	34	26	100%	100%	100%	100,0%	76%	Tidak Tercapai	Terkendala Kurangnya Sumber daya Manusia
3	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanggulangan bencana	Perka BNPB No 17 Tahun 2009	5 Unit kendaraan operasional		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100,0%	100%	Tercapai	
4	Meningkatnya disiplin ASN	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	Tercapai	
B	MENINGKATNYA INDIKATOR KETAHANAN DAERA	Perka BNPB No 2 Tahun 2012	0		SEDANG (0,65)	SEDANG (0,65)	SEDANG (0,65)	Sedang (0,55)	Tinggi (0,74)	Tinggi (0,74)	SEDANG (0,51)	SEDANG (0,51)	Sedang (0,41)	Sedang (0,41)	78%	78%	78%	55%	55%	Tidak Tercapai	Terkendala dikarenakan kurangnya dukungan anggaran
5	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Perka No 2 Tahun 2012	1 Dokumen		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	100%	0%	Tidak Tercapai	Terkendala dikarenakan kurangnya dukungan anggaran
6	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Permendagri No. 101 Tahun 2008	orang		0	0	30 orang	30 orang	30 Orang	0	0	30 Orang	30 Orang	0	0%	0%	100%	100%	0%	Tidak Tercapai	Terkendala dikarenakan kurangnya dukungan anggaran
7	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Perka No 4 Tahun 2008	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
8	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Permendagri No. 101 Tahun 2008	20 Dokumen		4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	100%	100%	100%	25,0%	100%	Tercapai	
9	Jumlah personil TRC tingkat Kabupaten yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Perka BNPB No 09 Tahun 2008	orang		25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0,0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia

7	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Perka No 4 Tahun 2008	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia	
8	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Permendagri No. 101 Tahun 2008	20 Dokumen		4	4	4	4	4	4	4	1	4	100%	100%	100%	25,0%	100%	Tercapai		
9	Jumlah personil TRC tingkat Kabupaten yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Perka BNPB No 09 Tahun 2008	orang		25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0,0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
10	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Perka No 4 Tahun 2008	orang		100	80	80	80	80	0	0	30	30	0	0%	0%	38%	37,5%	0	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
11	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia	
12	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Perka No 4 Tahun 2008	orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia	
13	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga		0	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%			

14	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Perka No 17 Tahun 2009	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
15	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Laporan		0	0	0		0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
16	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Perka No 03 Tahun 2016	Dokumen		3	0	4	4	0	3	0	4	0	0	100%	0%	100%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
17	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Laporan		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
18	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0,00%	Tidak Tercapai	Data Tidak Tersedia
19	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		Kegiatan		1	1	1	15	15	1	1	1	8	1	100%	100%	100%	53,3%	6,7%	Tidak Tercapai	Kurangnya kemampuan SDM dan Anggaran
20	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia

21	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
22	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Perka BNPB No 01 Tahun 2012	24 Desa		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
23	Jumlah relawan yang terlibat	Perka No 17 Tahun 2011	1000 orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
24	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Perka BNPB No 01 Tahun 2012	24 Desa		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	50%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
25	Jumlah diskusi dengan masyarakat	Perka No 3 Tahun 2012	10 kali rapat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
26	Updating Peta Risiko dan Dokumen Rencana penanggulangan Bencana	Perka No 3 Tahun 2012	9 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
27	Jumlah Sekolah yang berperan dalam Aplikasi Sekolah Aman bencana	Perka BNPB No 04 Tahun 2011	39 Sekolah		3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	67%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
28	Jumlah kegiatan pemeliharaan shelter	Perka No 3 Tahun 2012	5 Kegiatan		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
29	Jumlah peserta yang mengikuti simulasi	Perka No 3 Tahun 2012	1000 Orang		200	0	0	0	0	110	0	0	0	0	55%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
30	Jumlah publikasi informasi kebencanaan	Perka No 3 Tahun 2012	42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia

31	Jumlah peralatan peringatan dini yang terpasang	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Seluma	24 Lokasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
32	Jumlah peralatan komunikasi yang terpasang	Perka BNPB No 17 Tahun 2009	14 Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
33	Jumlah logistik dan Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	Perka BNPB No 17 Tahun 2009	5 Kegiatan		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
34	Jumlah tenaga Pusdalops	Perka No 15 Tahun 2012	510		120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	100%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
35	Jumlah penanganan kebencanaan dalam kondisi tanggap darurat	Perka No 3 Tahun 2016	45 Lokasi		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
36	jumlah dokumen usulan dan dana sharing	Perka No 5 dan 6 Tahun 2017	45 Lokasi		0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
37	Jumlah laporan yang ditindak lanjuti berupa Dokumen gambar dan RAB	Perka No 5 dan 6 Tahun 2017	45 Lokasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
38	Jumlah pelayanan psikososial bagi korban bencana	Perka No 5 dan 6 Tahun 2017	14 Kecamatan		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
39	Jumlah rumah warga yang mendapatkan bantuan material	Perka No 5 dan 6 Tahun 2017	30 rumah		10	0	0	0	0	8	0	0	0	0	80%	0%	0%	0,0%	0%	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia

Tabel 2.1.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH-BPBD KABUPATEN SELUMA																			
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN Ke-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN		Interpretasi	
	1=2020	2=2021	3=2022	4=2023	5=2024	1=2020	2=2021	3=2022	4=2023	5=2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	Capaian	Ket
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	17	18	21	22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.017.482.000	445.393.953	545.407.020	318.055.918	458.026.070	924.964.000	428.610.246	540.115.689	249.628.445	438.772.473	90,91%	96,23%	99,03%	78,49%	95,80%	(0,20)	(0,19)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000	8.500.000	8.980.000	2.500.000	5.000.000	9.000.000	8.500.000	8.980.000	-	4.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	80,00%	(0,12)	(0,16)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.640.000	39.372.116	39.371.500	36.696.350	39.279.000	53.640.000	21.634.511	32.640.536	27.896.597	25.889.069	100,00%	54,95%	82,90%	76,02%	65,91%	(0,07)	(0,17)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	9.999.000	9.991.950	-	5.000.000	-	9.999.000	9.991.950	-	4.700.000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	94,00%	0,20	0,19	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	247.200.800	74.499.937	101.470.860	34.990.000	33.464.580	219.200.800	64.509.937	97.504.803	-	54.576.940	88,67%	86,59%	96,09%	0,00%	163,09%	(0,43)	(0,38)	Tercapai	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.416.000	-	43.224.000	42.969.848	35.400.000	52.416.000	42.969.848	43.224.000	42.969.848	28.560.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	80,68%	(0,10)	(0,11)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.778.000	-	-	-	-	23.778.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penyediaan alat tulis kantor	46.347.200	39.503.100	-	-	-	36.347.200	39.503.100	-	-	-	78,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(0,48)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.659.800	15.929.600	34.417.250	1.813.900	3.144.920	16.659.800	15.929.600	34.417.250	-	2.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	79,49%	(0,19)	(0,20)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.928.200	-	-	-	-	14.928.200,00	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.518.000	-	71.304.480	1.997.100	12.292.070	-	-	71.304.480	-	10.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	81,35%	(0,07)	0,12	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.744.000	11.832.200	9.999.120	1.917.800	4.979.000	11.744.000	11.829.500	9.999.120	-	1.100.000	100,00%	99,98%	100,00%	0,00%	22,09%	(0,17)	(0,31)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.120.000	12.000.000	11.995.000	4.503.100	7.069.500	11.120.000	12.000.000	11.995.000	2.000.000	2.569.500	100,00%	100,00%	100,00%	44,41%	36,35%	(0,09)	(0,22)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan makanan dan minuman	37.000.000	6.671.000	21.999.100	2.000.000	6.600.000	37.000.000	6.671.000	21.998.550	2.000.000	4.600.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	69,70%	(0,41)	(0,45)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	209.200.000	35.671.000	81.060.000	11.762.000	89.797.000	174.200.000	35.663.750	81.060.000	11.762.000	89.276.964	83,27%	99,98%	100,00%	100,00%	99,42%	(0,28)	(0,22)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.928.200	-	-	-	-	14.928.200,00	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.518.000	-	71.304.480	1.997.100	12.292.070	-	-	71.304.480	-	10.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	81,35%	(0,07)	0,12	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.744.000	11.832.200	9.999.120	1.917.800	4.979.000	11.744.000	11.829.500	9.999.120	-	1.100.000	100,00%	99,98%	100,00%	0,00%	22,09%	(0,17)	(0,31)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.120.000	12.000.000	11.995.000	4.503.100	7.069.500	11.120.000	12.000.000	11.995.000	2.000.000	2.569.500	100,00%	100,00%	100,00%	44,41%	36,35%	(0,09)	(0,22)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan makanan dan minuman	37.000.000	6.671.000	21.999.100	2.000.000	6.600.000	37.000.000	6.671.000	21.998.550	2.000.000	4.600.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	69,70%	(0,41)	(0,45)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	209.200.000	35.671.000	81.060.000	11.762.000	89.797.000	174.200.000	35.663.750	81.060.000	11.762.000	89.276.964	83,27%	99,98%	100,00%	100,00%	99,42%	(0,28)	(0,22)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Perkantoran	230.400.000	191.416.000	120.573.760	164.250.000	216.000.000	230.400.000	159.400.000	117.000.000	163.000.000	215.000.000	100,00%	83,27%	97,04%	99,24%	99,54%	(0,02)	(0,02)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran		-		-		-	-				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi	15.330.000	-		-		15.330.000	-				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.566.200	-	9.998.650	-	10.980.680	24.566.200	-	9.998.650	-	9.302.000	100,00%		100,00%	0,00%	84,71%	(0,30)	(0,35)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Penyusunan Renja, Senstra, RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan

Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	24.566.200	-	9.998.650	4.292.130	10.980.680	24.566.200	-	9.998.650	2.924.000	9.302.000	100,00%	0,00%	100,00%	68,12%	84,71%	(0,27)	(0,33)	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.185.000	-	-	-	-	16.185.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	tidak tersedianya anggaran kegiatan
Pengadaan mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	tidak tersedianya anggaran kegiatan
Pengadaan Kendaraan dinas/operasiona	16.185.000	-	-	-	-	16.185.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Program peningkatan disiplin aparatur	35.184.600	5.072.000	-	-	2.995.000	35.184.600	5.071.650	-	-	2.995.000	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	100,00%	-	(0,74)	Tercapai	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	23.200.000					23.200.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Penyusunan DUK dan Laporan Analisa Kepegawaian	11.984.600	5.072.000	-	4.071.560	2.995.000	11.984.600	5.071.650	-	4.071.560	2.995.000	100,00%	99,99%	0,00%	100,00%	100,00%	-	(0,37)	Tercapai	
Koordinasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.601.300	-	-	-	-	50.001.300	-	-	-	-	62,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Pendidikan dan pelatihan formal	29.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Bimtek SKPD	50.001.300	-	-	-	-	50.001.300	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		748.958.450		476.487.900	447.280.710	-	264.428.316	693.088.970	341.057.900	354.780.380	0,00%	35,31%	0,00%	71,58%	79,32%	0,27	0,21	Tidak Tercapai	Anggaran Sub kegiatan Tidak Tersedia
Pelayanan Informasi Rawan Bencana						-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Penyusunan Kajian Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (per jenis Bencana)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak ada kegiatan
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	24.697.000	49.999.900	49.394.000	27.379.420	-	22.142.666	48.099.900	28.893.670	-	0,00%	89,66%	96,20%	58,50%	0,00%	0,18	-	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	85.808.000	140.000.000	250.000.000	249.000.000	-	85.400.000	140.000.000	204.000.000	246.998.000	0,00%	99,52%	100,00%	81,60%	99,20%	0,34	0,37	Tidak Tercapai	Terkendala dengan belum optimal nya penyusunan rencana kerja
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	-	-	-		-			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penanganan Pasca bencana Kabupaten /Kota	-	24.977.000	49.999.950	49.954.000	-	-	24.920.000	49.999.950	-		0,00%	99,77%	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	-	-	-						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengelolaan Risiko Bencana	-	-	-	-	-						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	-	-	-	-	-						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan

Pelayanan Penyelamatan dan EvakuasiKorban Bencana	-	63.569.950	-	-	-		63.381.500				0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Respon CepatDarurat BencanaKabupaten/Kota	-	15.379.000	194.999.750	30.758.000	41.866.400	-	15.339.000	194.999.750	19.757.800	41.866.400	0,00%	99,74%	100,00%	64,24%	100,00%	0,15	0,15	Tercapai	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	48.190.950	259.997.370	96.381.900	63.177.120	-	48.042.500	259.989.370	49.998.640	40.000.000	0,00%	99,69%	100,00%	51,88%	63,31%	0,14	0,10	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	-	-	-						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	-						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	549.906.500	-	-	-		68.584.150				0,00%	12,47%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alamt	-	-	-	-	-						0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penanganan Pasca Bencana	-	-	-	-	39.941.790				38.407.790		0,00%	0,00%	0,00%	96,16%	0,00%	1,00	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	-	-	-	-	25.915.980					25.915.980	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,00	1,00	Tercapai	
Koordinasi PenangananPascabencana	-	-	-	-							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	549.906.500	-	-	6.899.000		68.584.150			-	0,00%	12,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	14.075.890.797	-	-	-	-	14.075.890.797	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	114.016.500	-	-	-	-	114.016.500	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengelolaan Manajemen Logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana	189.300.000	-	-	-	-	189.300.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Rakor dan fasilitasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pembuatan dan pemasangan rambu evakuasi tsunami dan titik berkumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pasca Bencana	92.491.200	-	-	-	-	92.491.200	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Inventarisasi dan identifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan

Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten	47.671.000	-	-	-	-	47.671.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pembentukan Sekolah Aman Bencana	84.465.600	-	-	-	-	84.465.600	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengelolaan manajemen operasional PUSDALOPS (pusat pengendalian operasional)	310.279.400	-	-	-	-	310.279.400	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengelolaan Shelter	73.049.397	-	-	-	-	73.049.397	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Simulasi Kesiapsiagaan	51.231.700	-	-	-	-	51.231.700	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Ben	13.113.386.000	-	-	-	-	13.113.386.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00%		0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	31.020.000	-	-	-	-	31.020.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	31.020.000	-	-	-	-	31.020.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengadaan Sistem Peringatan Dini Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengadaan Sistem Radio Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	137.168.000	-	-	-	-	137.168.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	36.841.000	-	-	-	-	36.841.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100.327.000	-	-	-	-	100.327.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(1,00)	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pembinaan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan

Program tanggap darurat jalan dan jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program pembangunan turap/talud/bronjong	121.713.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Pembangunan turap/talud/bronjong	121.713.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	65.758.000	-	-	-	-	65.758.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	(1,00)	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	65.758.000	-	-	-	-	65.758.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	Tidak Tercapai	Tidak tersedianya Anggaran Kegiatan

Dari tabel 2.1.5 Pencapaian kinerja perangkat daerah dan tabel 2.1.6 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat Daerah – BPBD Kabupaten Seluma dapat diinterpretasikan sebagai berikut

- (1) Dari Standar peralatan kebencanaan dibutuhkan kendaraan operasional dengan jenis seperti tabel berikut :

Tabel 2.1.7 Standar Peralatan Kebencanaan

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Komando	1 Unit	Diganti kendaraan Hilux
2.	Mobil Ambulance	1 Unit	Belum ada
3.	Mobil Rescue	1 Unit	Hibah BNPB
4.	Mobil Operasional	1 Unit	Avanza/Panther
5.	Mobil Truk	1 Unit	Hibah BNPB
6.	Motor Trail	6 Unit	4 Hibah + 2 APBD
7.	Mobil Dapur Umum	1 Unit	Belum ada
8.	Mobil Tangki Air	1 Unit	Belum ada

- (2) Penanganan masalah strategis memiliki indikator daerah lokasi yang menjadi penanganan tanggap darurat. Dari total 45 Lokasi, ditargetkan seluruhnya tertangani. Dalam realisasinya terdapat 73 Lokasi yang terdampak bencana dan membutuhkan penanganan masa tanggap darurat.
- (3) Tim Reaksi Cepat merupakan bagian dari Tim Penanganan darurat yang terdiri dari BPBD dan instansi lain. Diproyeksikan 308 orang terlibat dalam Tim ini. Namun hanya terealisasi sebanyak 69 orang pada Tahun 2015
- (4) Desa Tangguh Bencana di rencanakan sebanyak 24 desa berdasarkan Master Plan Tsunami Kabupaten Seluma. Namun hanya terealisasi sebanyak 4 Desa.
- (5) Pengelolaan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, di rencanakan tersedia dalam anggaran setiap tahun.
- (6) Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana. Kegiatan ini ditujukan sebagai dasar dalam Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Dalam kegiatan ini tidak dianggarkan dalam anggaran BPBD namun mendapat bantuan kegiatan dari BNPB.
- (7) Inventarisasi dan Identifikasi kerusakan dan kerugian pasca bencana merupakan bagian dari tahapan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Direncanakan sebanyak 45 lokasi. Terealisasi 86 lokasi. Adapun putput yang dihasilkan berupa dokumen rekomendasi pembangunan pasca bencana.
- (8) Pembuatan dan pemasangan rambu evakuasi tidak dianggarkan dalam APBD namun mendapat hibah dari BNPB.

2.2. Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.a Permasalahan Pelayanan PD

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat sentralistik pada masa lalu serta penanganan persoalan pembangunan yang dilakukan tidak secara holistik dan berkelanjutan menyebabkan persoalan keterbelakangan Seluma dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan seakan terabaikan. Disamping itu, juga tidak bisa dipungkiri berbagai keterbatasan peran strategis untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan ketertinggalan serta menciptakan kondisi kemakmuran yang diidam-idamkan masyarakat.

Permasalahan yang ditemui oleh pemerintah Kabupaten Seluma antara lain :

- 1. Kualitas dan Kuantitas ASN BPBD masih tergolong rendah.

Secara garis besar, jumlah ASN BPBD sebanyak 43 orang dengan jumlah jabatan struktural 14 Jabatan yang terdiri dari

Tabel 2.2.1 Jumlah Jabatan ASN di BPBD

No	Jabatan	Jumlah Jabatan ASN di BPBD	Eselon	Staf
1	Kepala Pelaksana	1	Iib	
2	Sekretaris	1	III.b	
	2.a.Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	1	IV.a	3 Orang
	2.b. Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	IV.a	2 Orang
	2.c. Kasubag Keuangan	1	IV.a	2 Orang
3	Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	1	III.b	
	3.a. Kasi Pencegahan	1	IV.a	10 Orang
	3.b. Kasi Kesiapsiagaan	1	IV.a	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	III.b	
	4.a. Kasi Kedaruratan	1	IV.a	10 Orang
	4.b. Kasi Logistik	1	IV.a	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	III.b	
	5.a. Kasi Rehabilitasi	1	IV.a	1 Orang
	5.b. Kasi Rekonstruksi	1	IV.a	1 Orang

Dari total 43 orang ASN BPBD, maka yang telah mengikuti Diklat Formal maupun Diklat Tematik kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2 Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	Keterangan
1	Diklat PIM II	1	
2	Diklat PIM III	1	
3	Diklat PIM IV	1	
4	Diklat Manajemen Dasar Kebencanaan	3	
	Diklat Penyusunan Renkon	-	
6	Diklat Keuangan dan Kepegawaian	2	
7	Diklat Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	4	
8	Diklat Tim Reaksi Cepat	4	
9	Diklat Jitu Pasma/PDNA	4	
10	Diklat Pemetaan Risiko	1	

2. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- Beberapa sarana dan prasarana yang masih menjadi kebutuhan BPBD Kabupaten Seluma antara lain
- 1) Alat berat jenis Backhoe Loader 1 unit
 - 2) Mobil Tangki Air 1 Unit
 - 3) Light Portable 1 unit
 - 4) Radio repeater 1 unit
 - 5) Peralatan Sistem Peringatan Dini sebanyak 10 titik.
 - 6) Logistik Rutin
 - 7) Alat pelindung diri/Personal Protection Equipment
 - 8) Masker dan peralatan P3K lainnya
3. Keterbatasan anggaran yang diprioritaskan bagi penanggulangan bencana.
- Dalam APBD, kegiatan yang merupakan Kinerja Utama adalah bagian dari belanja langsung, tabel berikut merupakan jumlah anggaran BPBD dalam rentang waktu 3 tahun yang mengalami fluktuasi.

Tabel 2.2.3 Jumlah Anggaran BPBD Dalam Rentang Waktu Tahun Yang Mengalami Fluktuasi

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Dalam Rupiah)		
	2022	2023	2024
BNPB			
APBD Propinsi			
APBD Kabupaten	3.256.506.484,-*	3.256.738.082,-*	3.106.046.927,-
Dana Lainnya			

Tabel 2.2.4 Jumlah Anggaran Pengurangan Risiko Bencana

Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran Kegiatan PRB (dalam rupiah)		
	2022	2023	2024
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	49.999.900,-	34,393,670	27,379,420,-
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,-	204,000,000	249,000,000,-
Penanganan Pasca Bencana	49.999.950,-	39,941,790	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	134.999.750,-	19,757,800	41,866.400,-
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	109.999.820,-	97,998,640	63,177,120
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			6,899,000,-
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			25,915,980,-

4. Keterbatasan informasi dan komunikasi masyarakat yang masih dirasa kurang tentang penanggulangan bencana.

Dalam menyampaikan informasi terjadinya bencana, masyarakat masih mengandalkan hubungan personal dan belum mempergunakan sistem informasi yang baik, sehingga respon terhadap kebencanaan masih dirasakan kurang.

Keberadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sangatlah penting dan strategis dalam upaya melindungi dan mensejahterakan masyarakat Seluma. Tentunya peranan tersebut sangat relevan dan wajib dilaksanakan bersamaan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Seluma. Pemerintah Kabupaten Seluma memiliki komitmen dan konsisten mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Seluma.

Tabel 2.2.5 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketepatan Penanganan Kejadian Bencana	1.Sumber Daya Manusia	Kekurangan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
		2.Keterbatasan Anggaran	Masih terbatasnya anggaran program dan Kegiatan
		3. Komunikasi dan Koordinasi lintas sektor	Masih lemahnya peran lembaga lain dalam penanggulangan bencana

2.2.b Isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karna dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/ kerugian yang besar atau sebaliknya.

Identifikasi isu strategis ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang memengaruhi upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh berdasarkan tabel dibawah ini :

tabel 2.2.6 teknik menyimpulkan isu strategis PD

Potensi Daerah Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Kllhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
BPBD memiliki sumber daya manusia dan kelembagaan yang bisa dikembangkan menjadi pusat pelatihan kebencanaan daerah	kurangnya pelatihan sistematis dan terbatasnya SDM ahli menyebabkan respon dan koordinasi belum maksimal	kesiapan SDM yang menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim	menuntut SDM yang kompeten dan adaptif terhadap tren kebencanaa n global	didukung kebijakan pemerintahan pusat untuk profesionalisasi ASN dan relawan kebencanaan	diperlukan penguatan kapasitas lokal sesuai potensi dan resiko spesifik daerah	kompetensi dan keterampilan SDM kebencanaan yang masih perlu ditingkatkan dengan penyelenggaraan latihan kesipsiagaan,evakuasi dan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang, berkelanjutan.

1. Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilaksanakan oleh Kabupaten Seluma. Hal ini terlihat dari adanya peraturan yang dapat memperkuat upaya penanggulangan bencana. Kabupaten Seluma telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan tersebut masih bersifat dasar dan menyeluruh. Beberapa aturan teknis juga telah diterbitkan di Kabupaten Seluma sebagai aturan turunan dalam penanggulangan bencana. Penyusunan peraturan diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, dengan dasar hukum yang kuat, perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana, dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini dapat berpengaruh kepada ketersediaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Komitmen politis daerah Kabupaten Seluma telah dibangun, namun belum menyeluruh untuk seluruh pihak. Tidak hanya pada pemerintah daerah, komitmen ini juga perlu terlihat pada lembaga legislatif daerah. Respon positif anggota DPRD Kabupaten Seluma belum terlihat dalam pembahasan anggaran penanggulangan bencana. Selain itu, fungsi pengawasan upaya pengurangan risiko bencana juga belum ada dari DPRD Kabupaten Seluma.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma saat ini baru terlihat dari telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan BPBD Kabupaten Seluma sudah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma. Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat membentuk BPBD dan sekaligus mengokohkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut.

Struktur organisasi, personil dan fasilitas yang dimiliki BPBD Kabupaten Seluma saat ini dinilai belum memadai bagi pelaksanaan operasi hariannya. Dukungan bagi BPBD Kabupaten Seluma ini perlu dilanjutkan untuk menjamin meningkatnya kualitas layanan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma. Dukungan tambahan bagi peningkatan kualitas layanan BPBD dapat diarahkan kepada peningkatan kapasitas personil BPBD khususnya kepada pelaksanaan fungsi-fungsi koordinatif antar lembaga pemerintah

daerah, mau pun di luar lembaga pemerintah daerah, termasuk lembaga-lembaga vertikal.

4. Forum Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah Kabupaten Seluma juga menyadari bahwa banyak institusi di luar pemerintahan yang dapat menjadi aset pengurangan risiko bencana. Salah satu pengurangan risiko bencana membutuhkan Forum PRB. Kabupaten Seluma belum membentuk forum pengurangan risiko bencana. Berbagai komponen daerah terkait penanggulangan bencana diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Seluma.

Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Seluma belum terlaksana karena belum didukung dengan peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Perlu dukungan lanjut untuk memotivasi forum ini berjalan optimal. Fungsi-fungsi advokasi Forum PRB yang dapat memangkas jalur birokrasi perlu diperkuat. Kontribusi anggota-anggota forum dalam pengurangan risiko bencana perlu diperluas pada tingkatan aksi, tidak hanya dalam forum diskusi. Optimalitas pemanfaatan forum ini merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma. Optimalitas fungsi Forum PRB dapat dimulai dengan percepatan penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dan pemanfaatan data kebencanaan dalam pengambilan keputusan internal di institusi asal anggota forum.

5. Pusat Pengendali Operasi

Perwujudan fungsi koordinatif antar lembaga baik pemerintahan ataupun nonpemerintah belum sepenuhnya terlaksana. Kabupaten Seluma belum membentuk tim kaji cepat serta tim penyelamatan dan pertolongan korban bencana. Kedua tim ini beranggotakan personil lintas lembaga baik berasal dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Kedua tim ini bergerak pada saat masa krisis dibawah kendali Pusdalops PB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sudah membentuk Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana yang terstruktur. Pusdalops nantinya perlu diperkuat dengan prosedur operasi dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis.

6. Pengkajian dan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Salah satu pencapaian dasar yang telah dilakukan di Kabupaten Seluma adalah adanya penyusunan Kajian Risiko Bencana. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan dukungan dari BNPB sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan

oleh nasional. Dokumen KRB tersebut disusun berdasarkan kajian bahaya, kerentanan dan kapasitas untuk menghasilkan analisa risiko bencana secara spasial mau pun matriks. Hasil KRB telah dijadikan dasar bagi penyusunan dokumen RPB yang tengah disusun ini. Perencanaan penanggulangan bencana diarahkan kepada rencana-rencana untuk menekan potensi jumlah jiwa terdampak, potensi kerugian serta potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat tiap-tiap bencana yang ada di Kabupaten Seluma.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah

Telah adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma menjadi salah satu pertimbangan untuk diselaraskan dengan kajian dan hal terkait penanggulangan bencana. Peraturan daerah tentang RTRW belum disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana untuk mengurangi risiko yang ada serta mencegah peningkatan risiko. Pengintergrasian RTRW dengan berbagai kajian penanggulangan bencana diperlukan. Oleh karenanya, Kabupaten Seluma perlu melakukan pengkajian ulang RTRW yang mempertimbangkan prinsip pengurangan risiko bencana.

Hal lain yang perlu diperhatikan lainnya terkait Informasi penataan ruang yang mudah diakses oleh publik. Saat ini lembaga pemerintah yang memiliki tupoksi terkait informasi penataan ruang belum intens untuk penyampaian informasi tersebut di daerah. Selain itu, juga belum banyak masyarakat yang secara mandiri menggunakan informasi tersebut untuk mengurangi risiko bencananya secara parsial. Sehingga publik belum memanfaatkan informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana.

8. Data dan Informasi Bencana

Kabupaten Seluma belum memiliki sarana prasarana sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional. Data-data yang ada saat ini baru digunakan terbatas untuk membangun skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah, belum mengarah kepada penggunaan perencanaan pembangunan.

Sama halnya dengan pendataan kebencanaan, informasi kebencanaan Kabupaten Seluma telah memiliki mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan. Mekanisme dan prosedur ini belum diperkuat dengan aturan daerah. Belum adanya aturan ini memberikan pengaruh pada pengelolaan data dan informasi bencana yang belum diperbarui secara periodik dan belum dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan multi pihak.

9. Sosialisasi dan Latihan

Peningkatan kapasitas upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan Kabupaten Seluma belum pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Materi sosialisasi pun belum menggunakan materi standar. Di sisi lain, pembangunan kesadaran tersebut belum dapat menyentuh masyarakat hingga titik pengimplementasian aksi-aksi kesiagaan secara mandiri.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan perlu melibatkan beragam instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Seluma belum pernah menginisiasi penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan di daerah mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem sehingga belum tercipta kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan di Kabupaten Seluma.

10. Peralatan dan Logistik

Optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan membutuhkan peralatan dan logistik yang memadai. Pemenuhan kebutuhan sistematis perlu dilaksanakan berdasarkan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik. Kabupaten Seluma belum melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. Kajian kebutuhan tersebut perlu disusun dan disinkronisasi dengan Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas. Tidak hanya sampai kajian kebutuhan, Kabupaten Seluma juga belum mengadakan peralatan dan logistik kebencanaan yang dikelola oleh instansi yang telah ditunjuk dan ditempatkan dalam gudang-gudang logistik yang telah ditetapkan. Penyimpanan/pegudangan logistik PB nantinya diharapkan dapat dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan logistik, Kabupaten Seluma belum mengidentifikasi serta menjaga rantai penyediaan (*supply chain*) logistik. Rantai penyediaan logistik dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar termasuk diantaranya kebutuhan pangan bagi penduduk terdampak bencana. Selain kebutuhan pangan, kebutuhan penerangan tanggap darurat telah dilaksanakan di Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma belum memiliki lembaga di pemerintahan yang bertanggung jawab menyediakan energi listrik. Penyediaan energi listrik telah disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur yang mempertimbangkan skenario bencana terparah serta disusun berdasarkan Rencana Kontijensi. Rantai penyediaan juga menjawab kebutuhan sumber energi cadangan yang dapat digunakan saat terjadi bencana.

Penggunaan peralatan dan mekanisme pengelolaan peralatan di Kabupaten Seluma belum di uji coba dan beberapa peralatan dan personil belum tersertifikasi. Pelaksanaan uji coba perlu dilakukan untuk memperlihatkan bahwa personil mampu merespon kejadian bencana sesuai dengan SKTD dan sertifikasi penggunaan peralatan PB. Sumberdaya yang tersertifikasi dipercaya sebagai pemangku kepentingan kunci dalam respons kejadian bencana.

11. Peningkatan Kapasitas Berbasis Komunitas

Komunitas-komunitas yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas meliputi sekolah, rumah sakit, dan masyarakat desa. Di Kabupaten Seluma saat ini pendekatan khusus yang baru dilakukan terkait peningkatan kapasitas ada pada komunitas masyarakat desa. Komunitas sekolah belum ada sosialisasi dilakukan kepada seluruh sekolah/madrasah ditingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana tentang hasil/manfaat/tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB).

Kondisi serupa juga hampir sama terkait belum adanya peningkatan kapasitas pada rumah sakit dan puskesmas melalui kegiatan sosialisasi. Selain itu, sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Kabupaten Seluma belum menerapkan 4 (empat) modul *safety hospital* (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana). Untuk kedepannya proses peningkatan kapasitas ini belum memenuhi sertifikasi aspek *safety hospital* dan belum dapat dijadikan peningkatan akreditasi rumah sakit.

Untuk komunitas masyarakat telah ada inisiasi terkait peningkatan kapasitas masyarakat desa di Kabupaten Seluma. Peningkatan kapasitas tersebut masih dalam tahapan sosialisasi, namun belum di arahkan hingga penerapan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat dengan menggunakan indikator desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana di Kabupaten Seluma perlu ditindaklanjuti dan diharapkan menginspirasi dan membantu pembangunan desa tangguh di daerah lain.

12. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir

Potensi banjir di Kabupaten Seluma cukup tinggi sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang selaras dengan pengelolaan lingkungan. Pemerintahan maupun dikomunitas belum menginisiasi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini memberikan pengaruh kepada belum adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori, perlindungan daerah tangkapan air, dan restorasi sungai

untuk pengurangan risiko bencana banjir. Hal ini berdampak pada belum terlaksananya pengurangan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir.

Selain pencegahan, pengelolaan risiko banjir dilaksanakan melalui upaya mitigasi. Kabupaten Seluma belum memiliki inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) di daerah. Hal lainnya belum adanya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) di daerah.

Upaya lainnya adalah kesiapsiagaan bencana. Peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir belum dilakukan di Kabupaten Seluma terkait dengan rencana kontijensi dan sistem peringatan dini. Rencana Kontijensi yang disusun nantinya perlu tersinkronisasi dengan prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana banjir dan sistem peringatan dini bencana Banjir. Kedua upaya ini belum disatukan dalam sebuah prosedur penanganan darurat bencana banjir. Keberadaan perangkat kesiapsiagaan ini belum mampu memenuhi kebijakan penganggaran untuk penanganan darurat dan menimbulkan rasa aman pada masyarakat di daerah berisiko. Perlu lebih banyak upaya yang diarahkan untuk mengadvokasi sistem kesiapsiagaan ini pada pemangku kepentingan.

13. Pengelolaan Risiko Bencana Tanah Longsor

Penyepakatan bersama terkait kebijakan lingkungan hidup diperlukan karena berpengaruh pada bencana tanah longsor. Penerapan upaya-upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor belum terstruktur dan terarah dilakukan di Kabupaten Seluma. Hal ini terlihat dengan belum adanya upaya penguatan lereng pada kawasan berisiko untuk mencegah terjadinya bencana Kabupaten Seluma. Upaya penguatan lereng di beberapa titik rawan tanah longsor yang belum optimal akan menyebabkan kejadian yang berulang sehingga belum mampu mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor. Optimalitas pencegahan bencana tanah longsor di Kabupaten Seluma perlu menjadi salah satu fokus prioritas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kabupaten Seluma belum memiliki Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor, begitu pula dengan sistem peringatan dini bencana tanah longsor. Peningkatan kesiapsiagaan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya longsor. Berbagai upaya penanganan bencana tanah longsor ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana tanah longsor.

14. Pengelolaan Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

Upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan belum dilakukan di Kabupaten Seluma, khususnya untuk Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan, restorasi lahan gambut, penyusunan rencana kontijensi, dan peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan.

Perkuatan terhadap aturan diperlukan untuk menangani potensi kebakaran hutan dan lahan. Aturan ini berkaitan dengan aturan daerah yang mengatur tentang pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan serta restorasi lahan gambut yang berlaku tidak hanya untuk pemerintah dan masyarakat, tetapi juga untuk dunia usaha. Peningkatan kesiapsiagaan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya penanganan bencana ini masih perlu ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanganan bencana.

15. Pengelolaan Risiko Bencana Kekeringan

Pengelolaan risiko bencana kekeringan dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut belum dilaksanakan di Kabupaten Seluma. Pencegahan kekeringan baiknya dapat dilakukan dengan pengelolaan air permukaan. Pengelolaan air permukaan dilaksanakan melalui penyusunan perogram pengelolaan air permukaan yang diperkuat dengan peraturan daerah yang mengatur oprasinalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan. Dari segi kesiapsiagaan, kegiatan dapat dilakukan adalah melalui penyusunan rencana kontijensi dan sistem peringatan dini. Penyusunan kedua upaya tersebut belum dilaksanakan di Kabupaten Seluma dan diharapkan segera dilaksanakan agar pengurangan risiko bencana kekeringan dapat diminimalkan.

16. Pengelolaan Risiko Bencana Banjir Bandang

Pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan untuk pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS dan konservasi vegetatif DAS belum dilaksanakan maksimal. Kabupaten Seluma perlu menyusun kebijakan untuk upaya tersebut. Selain itu upaya lain pengelolaan risiko belum dilaksanakan Kabupaten Seluma terkait upaya kesiapsiagaan dalam penyusunan rencana kontijensi dan peringatan dini kekeringan. Rencana Kontijensi nantinya dilanjutkan dengan adanya uji coba melalui kegiatan pelatihan, simulasi, uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi *stakeholder*. Fokus upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir bandang. Kabupaten Seluma belum memiliki sistem peringatan dini banjir bandang.

Sistem peringatan dini tersebut perlu didukung pula melalui pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir bandang secara berkala oleh multi *stakeholder*.

17. Pengelolaan Risiko Bencana Gempa bumi

Pengelolaan risiko bencana gempabumi di Kabupaten Seluma dilakukan melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya mitigasi terkait kebijakan tentang bangunan tahan gempabumi belum dapat diterapkan secara optimal. Kebijakan dalam perizinan mendirikan bangunan (IMB) belum diatur dalam perencanaan tataruang dan belum diperkuat dengan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB tersebut. Oleh karenanya, belum ada tindakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggar IMB.

Kabupaten Seluma saat ini baru terbatas memiliki inisiatif penyusunan rencana kontijensi gempabumi. Perlu lebih banyak upaya yang diarahkan untuk mengadvokasi sistem kesiapsiagaan ini pada pemangku kepentingan, sehingga kesiapsiagaan bencana gempabumi dapat meningkat secara menyeluruh pada seluruh elemen di Kabupaten Seluma.

18. Pengelolaan Risiko Bencana Tsunami

Pengelolaan risiko bencana tsunami dilaksanakan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Pentingnya kegiatan mitigasi belum dirasakan di Kabupaten Seluma. Hal ini terlihat dari belum adanya inisiatif untuk pelaksanaan mitigasi penahan gelombang tsunami. Inisiatif perlu didukung oleh implementasi dan perencanaan. Dalam hal ini Kabupaten Seluma belum memiliki kebijakan atau regulasi penahan gelombang tsunami di Kabupaten Seluma.

Upaya lainnya adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan bencana tsunami dilaksanakan melalui ketersediaan rencana kontijensi, sistem peringatan dini, dan rencana evakuasi bencana tsunami. Saat ini Kabupaten Seluma belum memiliki Rencana Kontijensi Bencana tsunami untuk upaya kesiapsiagaan bencana. Rencana kontijensi ini diperkuat dalam sebuah prosedur penanganan darurat bencana tsunami. Perlu lebih banyak upaya yang diarahkan untuk mengadvokasi sistem kesiapsiagaan ini pada pemangku kepentingan, sehingga kesiapsiagaan bencana tsunami dapat meningkat secara menyeluruh pada seluruh elemen.

Hal lain adalah penyusunan sistem peringatan dini dan rencana evakuasi. Kabupaten Seluma belum menyusun sistem peringatan dini. Sistem ini dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi *stakeholder*. Sistem peringatan dini merupakan

langkah awal kegiatan evakuasi bencana tsunami. Kabupaten Seluma belum memiliki rencana evakuasi. Rencana evakuasi tersebut nantinya dapat dilanjutkan dengan pelatihan, simulasi dan uji sistem rencana evakuasi secara berkala oleh multi *stakeholder*. Harapannya masyarakat dapat melaksanakan upaya kesiapsiagaan untuk bencana tsunami.

19. Kapasitas Penanganan Darurat Bencana

Optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan Kabupaten Seluma untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Untuk mengatasi hal tersebut, Kabupaten Seluma belum menyusun mekanisme dan prosedur yang jelas dan diperkuat dengan aturan daerah. Mekanisme diperlukan penanganan darurat bencana meliputi mekanisme prosedur tentang penentuan status darurat bencana, prosedur perbaikan darurat, dan mekanisme penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana, dan mekanisme struktur komando tanggap darurat bencana belum dimiliki di Kabupaten Seluma.

Mekanisme dan prosedur ini belum mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam pencapaian efektivitas penanganan darurat bencana. Salah satu perspektif yang digunakan untuk menilai hal ini adalah pertumbuhan anggaran peralatan dan anggaran latihan penanganan darurat bencana yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Perspektif lainnya yang dapat digunakan untuk menilai belum efektifnya mekanisme dan prosedur tersebut adalah dengan masih terjadinya tumpang tindih penugasan dalam operasi penanganan darurat bencana dibawah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Seluma.

20. Kapasitas Pemulihan

Peningkatan kapasitas pemulihan akibat bencana di Kabupaten Seluma belum dilakukan secara optimal. Belum nampaknya perkembangan upaya pemulihan yang signifikan disebabkan pada umumnya belum tersedianya mekanisme dan rencana-rencana dasar untuk mendukung upaya-upaya pada masa pemulihan merupakan langkah awal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Seluma. Mekanisme yang telah disusun adalah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Selain itu, belum lengkapnya mekanisme meliputi mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Mekanisme dan rencana ini butuh disepakati secara formal oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Seluma. Selain itu, dalam proses penyusunan mekanisme dan rencana tersebut, belum mempertimbangkan seluruh ancaman bencana daerah dan prinsip-prinsip

risiko bencana, serta mengakomodir kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Secara umum, komponen-komponen kapasitas pemulihan di Kabupaten Seluma belum dapat dikatakan berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan komponen-komponen tersebut belum digunakan secara realistis untuk upaya pemulihan bencana dalam skala luas.

BAB III
TUJUAN,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, BPBD dibebankan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter	Mengurangi Risiko Bencana	- Meningkatkan ketahanan daerah - Meningkatkan pelayanan tanggap darurat - Meningkatkan pelayanan pasca bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten seluma Tahun 2025-2029 yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten seluma ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma salah satu perangkat daerah membantu bupati dalam mencapai visi dan misi tentang urusan bencana, tujuan dan sasaran merupakan inpack dari segenap operasionalisasi dari kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Inpact tersebut harus memberi ultimate goal dan keseleruhan kinerja utama setiap elemen pelaksanaan pembangunan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma.berdasarkan fungsi utama BPBD kabupaten seluma yaitu :

Menghindari Terjadinya Bencana dan Mengurangi Resiko Bencana Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Bencana

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana
- b. Meningkatkan pelayanan tanggap darurat
- c. Meningkatkan pelayanan pasca bencana
- d. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029

Pencapaian tujuan dan sasaran didalam rencana strategi (renstra) diperlukan strategi.

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BPBD kabupaten seluma dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (strengths-opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan stretegi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran renstra badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma.

BPBD Kabupaten Seluma mengemban Misi I yaitu *Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter*. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Adapun strategi yang diemban yaitu **Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana**.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.09.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
- Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Menghindari Terjadinya Bencana dan Mengurangi Resiko Bencana Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	
		Meningkatkan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	0	0	25	50	75	100	125	
		Meningkatkan pelayanan tanggap darurat	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	25	25	70	80	90	100	100	
		Meningkatkan pelayanan pasca bencana	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana (%)	50	50	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	70,81	70,83	70,86	70,89	70,92	70,95	70,98	

3.4 Arah Kebijakan PD 2025 – 2029

Arah Kebijakan yang diemban adalah:

”Penguatan identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan melalui pelestarian nilai-nilai lokal , peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan”

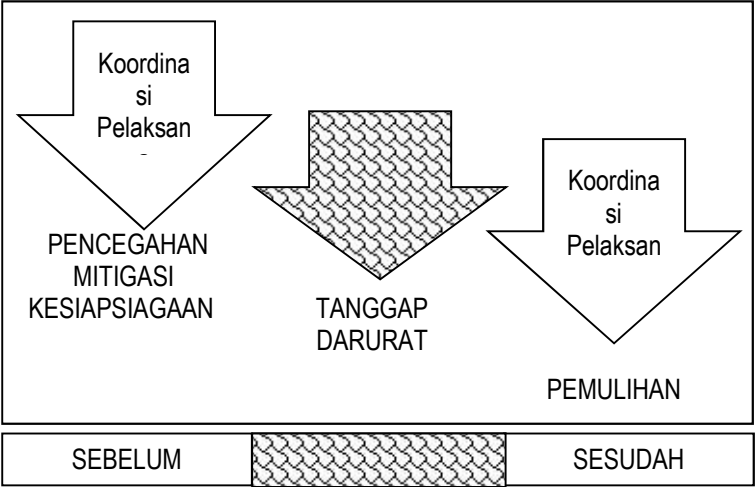
Pada dasarnya penyelenggaraan bencana adalah tiga tahap yakni :

- 1) Pra bencana yang meliputi :
 - Situasi tidak terjadi bencana;
 - Situasi terdapat potensi bencana.
- 2) Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana :
 - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - Pemulihan dengan segala prasarana dan sarana vital.
- 3) Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :
 - Rehabilitasi, adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 - Rekonstruksi, adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama yang tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana.
- Pada saat darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana.
- Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.



Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	sub urusan program penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma	Penguatan identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan melalui pelestarian nilai-nilai lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan	Peningkatan peran serta dunia Usaha dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana, Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta Pemulihan sarana dan prasarana umum pasca bencana	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini disajikan program dalam Rancangan Akhir Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2025-2029, tergambar dalam uraian dibawah ini yang berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2025 – 2029 serta penyusunan program juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma memiliki 2 (Dua) program, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penanggulangan Bencana

Kedua program diatas telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci, rencana program dapat dilihat pada tabel Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5.275.907.855,00		5.281.539.867,00		5.287.199.476,00		5.292.886.816,00		5.298.602.027,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.655.438.910,00		4.658.030.625,00		4.660.635.037,00		4.663.252.213,00		4.665.882.214,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD (BPBD)	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	70,81	70,83	70,86	4.655.438.910,00	70,89	4.658.030.625,00	70,92	4.660.635.037,00	70,95	4.663.252.213,00	70,98	4.665.882.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					620.468.945,00		623.509.242,00		626.564.439,00		629.634.603,00		632.719.813,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	0	0	0	318.823.115,00	50	320.385.348,00	50	321.955.237,00	50	323.532.817,00	50	325.118.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	88,43	89,31	90,21		91,11		92,02		92,94		93,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan pra bencana (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	69,18	69,87	70,57		71,28		71,99		72,71		73,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	88	89	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	50	50	100	299.614.160,00	100	301.082.269,00	100	302.557.573,00	100	304.040.104,00	100	305.529.901,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	4	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	50	50	100	2.031.670,00	100	2.041.625,00	100	2.051.629,00	100	2.061.682,00	100	2.071.784,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					5275907855.00		5281539867.00		5287199476.00		5292886816.00		5298602027.00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategi yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kegiatan yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sesuai dengan masing-masing Program yang telah ditetapkan oleh yang berwenang dengan berpedoman kepada RPJMD dan Visi Misi Bupati Seluma 2025 – 2029 untuk dijadikan pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan dalam rangka mencapai indikator dan sasaran yang telah ditetapkan.

Uraian Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.09.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
- Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Menghindari Terjadinya Bencana dan Mengurangi Resiko Bencana Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Bencana				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
		Meningkatkan kesiap siagaan terhadap bencana			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase penanganan pra bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatkan pelayanan tanggap darurat	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)		
					Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
					Persentase pendampingan penanganan pasca bencana (%)		
		Meningkatkan pelayanan pasca bencana	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	
				Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD (BPBD)		Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seluma.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Adapun indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seluma beserta target capaiannya dapat dilihat dalam Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma pada Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.275.907.855,00		5.281.539.867,00		5.287.199.476,00		5.292.886.816,00		5.298.602.027,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.655.438.910,00		4.658.030.625,00		4.660.635.037,00		4.663.252.213,00		4.665.882.214,00		
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD (BPBD)	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	70,81	70,86	4.655.438.910,00	70,89	4.658.030.625,00	70,92	4.660.635.037,00	70,95	4.663.252.213,00	70,98	4.665.882.214,00	1.05.0.00.0.00.09.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.858.332,00		2.872.338,00		2.886.412,00		2.900.556,00		2.914.768,00		
Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	34	12	2.858.332,00	12	2.872.338,00	12	2.886.412,00	12	2.900.556,00	12	2.914.768,00		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.858.332,00		2.872.338,00		2.886.412,00		2.900.556,00		2.914.768,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	34	12	2.858.332,00	12	2.872.338,00	12	2.886.412,00	12	2.900.556,00	12	2.914.768,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.122.917.564,00		4.122.917.564,00		4.122.917.564,00		4.122.917.564,00		4.122.917.564,00		
Jumlah Dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	43	4.122.917.564,00	43	4.122.917.564,00	43	4.122.917.564,00	43	4.122.917.564,00	43	4.122.917.564,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12				12				12			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.053.417.564,00		4.053.417.564,00		4.053.417.564,00		4.053.417.564,00		4.053.417.564,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	43	4.053.417.564,00	43	4.053.417.564,00	43	4.053.417.564,00	43	4.053.417.564,00	43	4.053.417.564,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				69.500.000,00		69.500.000,00		69.500.000,00		69.500.000,00		69.500.000,00		

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	69.500.000,00	12	69.500.000,00	12	69.500.000,00	12	69.500.000,00	12	69.500.000,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00	12	3.600.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.497.500,00		1.504.838,00		1.512.211,00		1.519.621,00		1.527.067,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1.497.500,00	0	1.504.838,00	0	1.512.211,00	0	1.519.621,00	0	1.527.067,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0		0		0							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12							
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60	0		0		0							
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.497.500,00		1.504.838,00		1.512.211,00		1.519.621,00		1.527.067,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1.497.500,00	12	1.504.838,00	12	1.512.211,00	12	1.519.621,00	12	1.527.067,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				64.898.340,00		65.216.342,00		65.535.901,00		65.857.028,00		66.179.727,00		
Jumlah Paket	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	64.898.340,00	12	65.216.342,00	12	65.535.901,00	12	65.857.028,00	12	66.179.727,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12					

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.732.875,00		2.746.266,00		2.759.723,00		2.773.245,00		2.786.834,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	1	2.732.875,00	1	2.746.266,00	1	2.759.723,00	1	2.773.245,00	1	2.786.834,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.215.485,00		12.275.341,00		12.335.490,00		12.395.934,00		12.456.674,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	3	12.215.485,00	3	12.275.341,00	3	12.335.490,00	3	12.395.934,00	3	12.456.674,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.983.390,00		15.056.809,00		15.130.587,00		15.204.727,00		15.279.230,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	6	14.983.390,00	6	15.056.809,00	6	15.130.587,00	6	15.204.727,00	6	15.279.230,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.034.750,00		8.074.120,00		8.113.683,00		8.153.441,00		8.193.392,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	8.034.750,00	12	8.074.120,00	12	8.113.683,00	12	8.153.441,00	12	8.193.392,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.300.000,00		3.316.170,00		3.332.419,00		3.348.748,00		3.365.157,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.300.000,00	12	3.316.170,00	12	3.332.419,00	12	3.348.748,00	12	3.365.157,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.631.840,00		23.747.636,00		23.863.999,00		23.980.933,00		24.098.440,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	23.631.840,00	12	23.747.636,00	12	23.863.999,00	12	23.980.933,00	12	24.098.440,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421.000.000,00		423.062.900,00		425.135.908,00		427.219.073,00		429.312.449,00		
Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	421.000.000,00	12	423.062.900,00	12	425.135.908,00	12	427.219.073,00	12	429.312.449,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000,00		9.044.100,00		9.088.416,00		9.132.949,00		9.177.701,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	9.000.000,00	12	9.044.100,00	12	9.088.416,00	12	9.132.949,00	12	9.177.701,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22.000.000,00		22.107.800,00		22.216.128,00		22.324.987,00		22.434.380,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	22.000.000,00	12	22.107.800,00	12	22.216.128,00	12	22.324.987,00	12	22.434.380,00		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000,00		3.014.700,00		3.029.472,00		3.044.316,00		3.059.234,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	3.014.700,00	12	3.029.472,00	12	3.044.316,00	12	3.059.234,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				387.000.000,00		388.896.300,00		390.801.892,00		392.716.821,00		394.641.134,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	387.000.000,00	12	388.896.300,00	12	390.801.892,00	12	392.716.821,00	12	394.641.134,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.667.174,00		38.856.643,00		39.047.041,00		39.238.371,00		39.430.639,00		
Jumlah Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	2	38.667.174,00	2	38.856.643,00	2	39.047.041,00	2	39.238.371,00	2	39.430.639,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.667.174,00		38.856.643,00		39.047.041,00		39.238.371,00		39.430.639,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	2	38.667.174,00	2	38.856.643,00	2	39.047.041,00	2	39.238.371,00	2	39.430.639,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				620.468.945,00		623.509.242,00		626.564.439,00		629.634.603,00		632.719.813,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	88	90	15.000.000,00	91	15.073.500,00	92	15.147.360,00	93	15.221.582,00	94	15.296.168,00	1.05.0.00.0.00.09.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	88,43	90,21		91,11		92,02		92,94		93,87			
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.073.500,00		15.147.360,00		15.221.582,00		15.296.168,00		
Jumlah Dokumen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	0	30	15.000.000,00	30	15.073.500,00	30	15.147.360,00	30	15.221.582,00	30	15.296.168,00		
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0												
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				15.000.000,00		15.073.500,00		15.147.360,00		15.221.582,00		15.296.168,00		

Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	0	30	15.000.000,00	30	15.073.500,00	30	15.147.360,00	30	15.221.582,00	30	15.296.168,00		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	50	100	301.645.830,00	100	303.123.894,00	100	304.609.202,00	100	306.101.786,00	100	307.601.685,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	4	100		100		100		100		100			
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				299.614.160,00		301.082.269,00		302.557.573,00		304.040.104,00		305.529.901,00		
Jumlah Laporan	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	0	299.614.160,00		301.082.269,00	0	302.557.573,00	0	304.040.104,00	0	305.529.901,00		
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0				0				0			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0				0				0			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	0	0				0				0			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0				0				0			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0	0				0				0			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0	1.000				1.000				1.000			
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	2	2				2				2			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)

2025-2029

Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				149.614.160,00		150.347.269,00		151.083.971,00		151.824.282,00		152.568.221,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	2	2	149.614.160,00	2	150.347.269,00	2	151.083.971,00	2	151.824.282,00	2	152.568.221,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.735.000,00		151.473.602,00		152.215.822,00		152.961.680,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0	1.000	150.000.000,00	1.000	150.735.000,00	1.000	151.473.602,00	1.000	152.215.822,00	1.000	152.961.680,00		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				2.031.670,00		2.041.625,00		2.051.629,00		2.061.682,00		2.071.784,00		

Jumlah Dokumen	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	0	2.031.670,00	0	2.041.625,00	0	2.051.629,00	0	2.061.682,00	0	2.071.784,00		
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0		0		0				0			
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)													
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			

	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0		0		0				0			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				1.455.790,00		1.462.923,00		1.470.092,00		1.477.295,00		1.484.534,00		

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)

2025-2029

Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	12	1	1.455.790,00	1	1.462.923,00	1	1.470.092,00	1	1.477.295,00	1	1.484.534,00		
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				575.880,00		578.702,00		581.537,00		584.387,00		587.250,00		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	12	1	575.880,00	1	578.702,00	1	581.537,00	1	584.387,00	1	587.250,00		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	50	100	303.823.115,00	100	305.311.848,00	100	306.807.877,00	100	308.311.235,00	100	309.821.960,00		
	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	69,18	70,57		71,28		71,99		72,71		73,44			
	Persentase penanganan pra bencana (%)	0	100		100		100		100		100			
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	0	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				303.823.115,00		305.311.848,00		306.807.877,00		308.311.235,00		309.821.960,00		
Jumlah Laporan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	15	5	303.823.115,00	5	305.311.848,00	5	306.807.877,00	5	308.311.235,00	5	309.821.960,00		
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	0				0				0			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)													
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)													
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)													
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)													
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)													

	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)													
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)			0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)			0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0		0		0		0		0		

Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)			0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0		0		0		0		0		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				250.175.900,00		251.401.762,00		252.633.631,00		253.871.535,00		255.115.506,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	4	250.175.900,00	4	251.401.762,00	4	252.633.631,00	4	253.871.535,00	4	255.115.506,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				53.647.215,00		53.910.086,00		54.174.246,00		54.439.700,00		54.706.454,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	15	5	53.647.215,00	5	53.910.086,00	5	54.174.246,00	5	54.439.700,00	5	54.706.454,00		

4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan prioritas dalam Renstra adalah kegiatan-kegiatan spesifik dalam sebuah program prioritas yang memiliki urgensi tinggi, dampak luas, dan secara langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kegiatan ini dipilih berdasarkan skala prioritas untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi sesuai tujuan perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma memiliki 9 Subkegiatan Prioritas, pemilihan subkegiatan ini bertujuan untuk memenuhi sasaran RPJMD Kabupaten Seluma dan RENSTRA BPBD Kabupaten Seluma.

Uraian Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.09.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

4.5 Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKU digunakan untuk mengukur kinerja, seperti kualitas, kuantitas, dan efektivitas, dan menjadi prioritas dalam perumusan program dan kegiatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dalam rangka memenuhi tujuan menghindari Terjadinya Bencana dan Mengurangi Resiko Bencana Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Bencana memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.

Uraian Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Tabel 4.5 Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.09.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	
3.	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	50	50	100	100	100	100	100	
4.	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	25	25	70	80	90	100	100	
5.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	70,81	70,83	70,86	70,89	70,92	70,95	70,98	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, program, atau instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya, Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi untuk mengukur capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, dengan fokus pada hasil akhir atau "outcome" dari suatu program atau kebijakan.

Uraian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Tabel 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Positif	Persentase	50	50	100	100	100	100	100	
3.	Persentase penanganan pra bencana	Positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Positif	%	69,18	69,87	70,57	71,28	71,99	72,71	73,44	
5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Positif	%	88	89	90	91	92	93	94	
6.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Positif	%	0	0	100	100	100	100	100	
7.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Positif	%	4	100	100	100	100	100	100	
8.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	positif	%	0	0	50	50	50	50	50	

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma disusun melalui proses dan secara sistematis serta berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma menyusun Rencana Strategi (Renstra) 5 (lima) tahun kedepan dengan pertimbangan-pertimbangan perkembangan dimasa yang akan datang.

Dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dinamis sehingga pada saatnya nanti dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai dengan baik.

Kalaupun daerah Kabupaten Seluma adalah termasuk / dikategorikan daerah rawan bencana dan juga personil pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma yang tidak berlatar belakang ilmunya di bidang bencana dan juga tidak berpengalaman di bidang penanganan bencana, namun akan dilakukan berbagai upaya-upaya serta pemanfaatan potensi yang telah ada.

Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun ini diharapkan mampu mengurangi resiko bencana dan menanganinya secara teratur, terkoordinasi, menyeluruh dan merata serta memberi arti dalam perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2025 – 2029.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Ampar Gading Komplek Perumahan Dinas Pemda Kabupaten Seluma
Kodepos 38576 Tlp/Fax : (0736) 7391000

KEPUTUSAN PIt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 - 2029
PIt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Mencegah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 - 2026, Maka perlu Menyusun dan Menyelaraskan rencana strategis perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam hufuf a konsideran menimbang maka perlu membentuk tim penyusun rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten seluma tahun 2025 - 2029 dengan keputusan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten seluma.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. undang - undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Dearah.
9. Keputusan Mentrri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020.
10. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);
13. Peraturan Pemerintah nomor 18 tanun 2016 tentang perangkat daerah;
14. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelola keuangan daerah, sebagaimana telah diubah bebetrapa kali, terakhir dengan peraturan mentri dalam negri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
16. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 6 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten seluma tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma
(Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2010 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim penyusun rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengelolaan data dan informasi;
 - b. Menganalisis gambaran pelayanan organisasi kerja perangkat daerah;
 - c. Perumusan isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
 - d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah;
 - e. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029.
- KETIGA :** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas tim penyusun rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beserta akibat yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada DPA – SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2025
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA
BPBD
KABUPATEN SELUMA


SUSI ARITONANG, SE
NIP. 19760316 200604 2 002

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seluma;
- 2. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR	:	13 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN
2025 - 2029

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SUSI ARITONANG, SE NIP. 19760316 200604 2 002	Ketua
2.	NOPEM HAIRI, S.IP NIP. 19831101 200604 1 004	Sekretaris
3.	FIRMANSYAH, ST NIP. 19750912 200604 1 007	Anggota
4.	ISWANDI, S.IP NIP. 19771011 200312 1 005	Anggota
5.	APRILDA IRAWATI, SE NIP. 19790404 200604 2 022	Anggota
6.	MERI APRIZAL, S.IP NIP. 19820416 200701 1 006	Anggota
7.	FITRI SEPTIANA, S.KEP NIP. 19870624 2011 01 2008	Anggota
9.	NURUL HIDAYAT, S.Ak NIP. 19980319 2025061006	Anggota
10.	AHMAD DINO KURNIAWAN, S.T NIP. 19960610 2025061005	Anggota
11.	ANDRIYANTO SAPUTRA, S.T NIP. 19930425 2025061001	Anggota
12.	CICI TRIWINATA, S.Ak NIP. 19980720 2025062004	Anggota
13.	TRISNA DELLA, S.Ak NIP. 19950914 2025062004	Anggota

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA
BPBD
KABUPATEN SELUMA


SUSI ARTONANG, SE
NIP. 19760316 200604 2 002